

## **PENGHITUNGAN BIAYA SATUAN PENDIDIKAN DENGAN METODE ACTIVITY BASED COSTING (ABC) DI SMP NEGERI 1 MERBAU**

Wannisyah Darlina<sup>1</sup>, Eka Daryanto<sup>2</sup>, Restu<sup>3</sup>

<sup>1</sup>PascaSarjana Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Medan

<sup>2</sup>PascaSarjana Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Medan

<sup>3</sup>PascaSarjana Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Medan

<sup>1</sup>wannisyah.smpn1@gmail.com, <sup>2</sup>ekadaryanto@unimed.ac.id, <sup>3</sup>restugiran@unimed.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research is aimed at applying the Activity Based Costing (ABC) method to make calculations regarding student unit costs at SMP Negeri 1 Marbau and calculate the amount of unit costs per student based on level. Techniques related to data collection are related to using interviews and documentation. The data analysis technique was carried out using descriptive data analysis with a quantitative approach to explain the calculation of student unit costs. So from the research results, it is known that the application of the Activity Based Costing (ABC) method to calculate student unit costs at SMP Negeri 1 Marbau is carried out through the following stages: (a) Identifying and classifying activities. (b) Assign costs to activities and between activities. (c) assign activity costs to cost objects. The unit fee per student per level for Class VII is Rp. 3,023,638, for Class VIII is Rp. 2,594,783 and for Class IX is Rp 2,591,925.*

*Keywords: unit cost, activity based costing*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini ditujukan untuk penerapan metode Activity Based Costing (ABC ) untuk membuat penghitungan terkait Biaya Satuan siswa di SMP Negeri 1 Marbau dan melakukan penghitungan besarnya Biaya Satuan per siswa berdasarkan tingkatan. Teknik terkait pengumpulan data terkait dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis data deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk memaparkan perhitungan Biaya Satuan siswa. Maka dari hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan metode Activity Based Costing (ABC) untuk menghitung biaya satuan siswa di SMP Negeri 1 Marbau dilakukan melalui tahapan berikut : (a) Mengidentifikasi dan menggolongkan aktivitas. (b) Membebankan biaya ke aktivitas dan antar aktivitas. (c) membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Biaya Satuan per siswa per tingkat untuk Kelas VII sebesar Rp 3,023,638 kemudian Kelas VIII sebesar Rp 2,594,783 dan untuk Kelas IX sebesar Rp 2,591,925.*

*Kata kunci: biaya satuan, activity based costing,*

### **A. Pendahuluan**

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia adalah melalui jalur pendidikan. Melalui pendidikan, maka siapa saja akan memiliki cara dan

jalan untuk mengasah serta mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya. Tentu saja dengan berkembang dan terarahnya kemampuan tersebut kelak akan meningkatkan taraf hidupnya serta memberikan kontribusi yang nyata untuk kemajuan negara ini. Oleh sebab itu, sejalan dengan baik dan meningkatnya pendidikan di negara ini juga akan mendukung kemajuan ekonominya.

Ada begitu banyak program dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Diantaranya adalah peningkatan kualitas dari para pendidik, fasilitas yang diberikan untuk kelancaran pendidikan, kurikulum yang disediakan, pemilihan metode belajar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentu saja pendukung dari semua program dan kegiatan tersebut haruslah adanya pembiayaan.

Menurut Fattah dalam (Kurniasih & Setyorini, 2018) Upaya peningkatan mutu perluasan pendidikan membutuhkan sekurang-kurangnya tiga faktor utama, yaitu: 1. Kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti dan kualitas tenaga kependidikan, biaya, sarana belajar 2. Mutu proses belajar-mengajar yang dapat

mendorong siswa belajar secara efektif 3. Mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai-nilai. Dari pernyataan diatas yang membahas tentang sumber pendidikan dan mutu terkait dalam perspektif pendidikan, maka pembiayaan pendidikan adalah salah satu komponen yang sangat penting untuk terselenggara serta lancar segala proses tersebut. Sebab perlu kita ketahui, kita tidak mungkin mengabaikan peranan biaya demi kelancaran proses dan peningkatan mutu pendidikan.

Maka dari itu, untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, terbitlah banyak peraturan yang mendukung kebijakan terkait pembiayaan pendidikan. Salah satunya adalah UU No. 20 Tahun 2003 pasal 34 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana dalam hal ini Pemerintah pusat dan daerah diharuskan mengalokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan terlaksananya segala proses terkait pendidikan nasional. Dimana konsekuensi dari peraturan dan kebijakan tersebut, pemerintah pusat dan daerah berusaha berkerja sama untuk memberikan layanan

pendidikan gratis, meskipun saat ini masih untuk tingkat dasar (SD dan SMP). Kesemuanya hal ini dilakukan pemerintah untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar. Inilah bukti nyata bahwa Pemerintah Indonesia serius dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Salah satu aspek yang ada dalam lingkup administrasi pendidikan yang turut menunjang terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendidikan adalah biaya pendidikan. Tanpa adanya dana untuk pembiayaan pendidikan maka mustahil bisa terlaksananya penyelenggaraan segala hal terkait pendidikan. Biaya Pendidikan adalah suatu bentuk pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, terutama mencetak kualitas pribadi lulusan sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yayasan, maupun entitas sekolah itu sendiri (Indra Bastian : 2007).

Maka dari itu kehadiran PP 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menjawab bagaimana seharusnya pendidikan itu berlangsung. Terkait tentang

pendanaan, seperti yang tertera pada PP 48 tahun 2008 bahwa dana pendidikan dibagi kepada biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal.

Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis dalam pembiayaan pendidikan, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per siswa (unit cost). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan penggabungan biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, maupun masyarakat yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam masa periode satu tahun pelajaran.

Untuk menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara efektif bagi kepentingan siswa dalam menempuh masa pendidikan dapat diukur dengan biaya satuan per siswa . Biaya satuan ini didapatkan dari perhitungan jumlah siswa yang ada sekolah, kemudian dijadikan patokan biaya satuan standar dan dapat dibandingkan antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Ada juga biaya yang dikeluarkan oleh siswa

yang disebut biaya pribadi (private cost) atau biaya personal (personal cost) berupa SPP (disekolah swasta). Sedangkan biaya satuan pendidikan meliputi uang transport, pakaian seragam sekolah, alat tulis, buku, konsumsi, dan akomodasi.

Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tatanan, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini.

Dalam penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga), Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan

alokasi anggaran pendidikan sebesar minima 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),sesuai amanat UndangUndang. Setiap tahunnya pula pemerintah daerah menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah. Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk keperluan operasional sekolah. Melalui penyusunan dan pelaksanaan penggunaan biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan.

Adapun terkait sumber biaya pendidikan antara lain adalah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumbangan/ hibah, pihak swasta, dunia usaha serta masyarakat yang dikenal sebagai orang tua peserta didik. Menurut supriadi pada (Kurniasih & Setyorini, 2018) pada tingkat sekolah, biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pusat, pemerintah daerah, iuran siswa dan sumbangan masyarakat.

Adapun besaran dana pendidikan yang tersedia dikatakan bisa menentukan ketercapaian tujuan pendidikan. Sebab, besarnya dana, pengelolaan pembiayaan yang tepat, efektif dan efisien adalah kontribusi nyata terhadap terwujudnya mutu pendidikan sesuai yang diharapkan. Tentu saja masalah biaya dan pendanaan ini menjadi tantangan bagi para pengelola atau pemimpin pendidikan terkait cara penggunaannya dan mengelola sumber daya yang tersedia untuk lancarnya penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan efektif.

Seperti yang kita ketahui, perhitungan biaya di pendidikan dasar (SD dan SMP) yang ada selama ini masih sangat sederhana serta bisa dikatakan belum mampu untuk memngungkap informasi penting sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Perhitungan yang ada masih sebatas biaya belanja pegawai dan non pegawai.

Pembiayaan pendidikan adalah hal yang menyangkut penggunaan dana secara efektif dan efisien. Fattah (2009 : 3 dalam (Syahputra, Muhammad Rizki, Daryanto, Eka, Rangkuti, 2018)) menjelaskan biaya pendidikan meliputi biaya langsung

(direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Menurut Indra Bastian (2007 dalam (Nurfauzia & Taman, 2016)) menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah suatu bentuk pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, terutama mencetak kualitas pribadi lulusan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, yayasan, maupun entitas sekolah itu sendiri. Jadi Pembiayaan pendidikan merujuk pada semua sumber daya finansial yang dialokasikan untuk mendukung sistem pendidikan. Ini mencakup dana untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, gaji guru, bahan ajar, penelitian, serta program dan kegiatan pendukung lainnya. Pembiayaan ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat dan daerah, swasta, sumbangan dari individu atau lembaga, serta biaya yang dibayar oleh peserta didik dan keluarganya.

Charles T. Horngreen, dkk (2008 (Andreti, n.d.)) menyatakan bahwa salah satu cara terbaik untuk memperbaiki sistem perhitungan biaya adalah dengan menerapkan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau Activity

Based Costing (ABC). Dalam hal ini sistem ABC diharapkan bisa memperbaiki sistem kalkulasi biaya untuk mengidentifikasi aktivitas individual sebagai objek biaya dasar. Adapun dalam penghitungan yang tentu saja memiliki perbedaan utama antara akuntansi biaya yang selama ini dipakai dengan sistem ABC adalah jumlah pemicu biaya (cost driver) lebih banyak.

Metode Activity Based Costing memiliki satu manfaat yang dapat menekan jumlah biaya. Hal ini terjadi karena metode Activity Based Costing ini perhitungannya menekankan pada aktivitas sebagai objek biaya dasar. Dimana nantinya Beban unit tiap peserta didik akan dibandingkan dengan subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga diketahui jumlah beban yang akan ditanggung peserta didik bila ada. Maka dari itulah, sekolah dituntut untuk dapat mengkomunikasikan secara transparan dan terbatas atas biaya penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan sekolah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa Biaya Satuan

Pendidikan (unit cost) per peserta didik per tahun SMP Negeri 1 Marbau dengan menggunakan metode Activity Based Costing.

Menurut Coombs dan Hallak ((1978 dalam (Syahputra, Muhammad Rizki, Daryanto, Eka, Rangkuti, 2018)), biaya satuan per siswa per tahun dihitung dengan membagi total pengeluaran per tahun akademik dengan jumlah murid yang terdaftar dalam kategori pendidikan tertentu.

Dalam pembiayaan pendidikan juga ada anggaran biaya pendidikan. Dimana anggaran biaya pendidikan terkait dengan anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah Pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur (Neneng Fatah dalam (Syahputra, Muhammad Rizki, Daryanto, Eka, Rangkuti, 2018)).

Metode Activity Based Costing digunakan untuk penghitungan biaya yang timbul karena aktivitas menggunakan sumber daya secara akurat. Dasar pemikiran pendekatan penentuan ini adalah bahwa produk atau jasa perusahaan dilakukan oleh

aktivitas dimana aktivitas yang dilakukan tersebut menggunakan sumber daya yang menimbulkan biaya. Sumber daya dibebankan pada aktivitas, kemudian aktivitas dibebankan kepada objek biaya berdasarkan penggunaannya. Adapun penerapan metode ini adalah untuk membantu manajemen pendidikan dalam mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan atau yang tidak memberikan kontribusi baik terhadap kemajuan peserta didik maupun kebutuhan organisasi pelayanan pendidikan.

Indra Bastian (2015 dalam (Andreti, n.d.))menjelaskan bahwa penerapan Activity Based Costing dalam organisasi pelayanan pendidikan merupakan suatu pendekatan terhadap sistem akuntansi pelayanan pendidikan yang memfokuskan pada aktivitas yang dilakukan. Penghitungan segala pembiayaan melalui pendekatan ini didasari konsep pelayanan pendidikan yang mengkonsumsi aktivitas dan aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya organisasi pelayanan pendidikan.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, metode Activity-Based Costing (ABC) adalah sistem

akuntansi yang lebih akurat dalam mengalokasikan biaya ke produk atau layanan berdasarkan aktivitas yang terlibat dalam proses produksi atau penyediaan layanan. Metode ini memberikan wawasan yang lebih jelas tentang penggerak biaya dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informatif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti menganggap penting untuk meneliti tentang " PENGHITUNGAN BIAYA SATUAN PENDIDIKAN DENGAN METODE *ACTIVITY BASED COSTING (ABC)* DI SMP NEGERI 1 MERBAU Tahun Pelajaran 2022/2023".

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Diharapkan melalui jenis penelitian deskriptif maka diperoleh gambaran mengenai perhitungan Biaya Satuan dengan menggunakan metode ABC. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan besaran angka dan memaparkan hasil penghitungan Biaya Satuan per siswa per tingkat

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Marbau yang beralamat di Jl. Besar Marbau,

Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2024

Subjek penelitian adalah pihak yang dimintai informasi, dalam hal ini adalah Kepala sekolah, Kepala tata usaha dan Bendahara SMP Negeri 1 Marbau. Objek penelitian ini adalah perghitungan Biaya Satuan per siswa di SMP Negeri 1 Marbau Tahun Pelajaran 2022 - 2023.

#### **C.Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **Besaran Satuan Biaya Pendidikan SMP Negeri 1 Merbau yang Bersumber dari Pemerintah pada Tahun Pelajaran 2022/2023**

Besaran Satuan Biaya Pendidikan SMP Negeri 1 Marbau Bersumber dari Pemerintah pada Tahun Pelajaran 2022 / 2023 adalah sesuai dengan banyaknya jumlah siswa yang ada pada tahun ajaran berlangsung tersebut. Sumber pendapatan untuk biaya pendidikan di SMP Negeri 1 Marbau hanya berasal dari Pemerintah yaitu berupa dana BOS. Program BOS ini bertujuan untuk menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun pendidikan dasar dengan tanpa memberatkan

pembiayaan bagi para peserta didik maupun orang tua peserta didik. Sebab perlu kita ketahui, bahwa biaya operasional sekolah ditentukan oleh besarnya jumlah pesera didik dan komponen biaya tetap yang tidak tergantung peserta didik. Berdasarkan. Untuk tahun pelajaran 2022-2023, Pemerintah menetapkan bahwa dana BOS yang akan diterima sebesar Rp. 1.100.000/ siswa/ tahun. Penyaluran dana dilakukan 2 x dalam setahun atau dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Tujuan utama program BOS ini adalah untuk mendanai biaya operasional non personalia pada satuan pendidikan dasar yang melaksanakan program wajib belajar. Sebagaimana tercantum dalam PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan mencakup biaya bahan dan peralatan yang habis dipakai, serta biaya listrik, air, jasa komunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, konsumsi, pajak, sampai ke biaya lembur yang dianggap penting untuk kelancaran proses pendidikan.

Selain itu, beberapa pembiayaan investasi dan personalia ada yang diperbolehkan dibiayai menggunakan dana BOS. Seperti



pembiayaan modal dan staf yang tersedia dengan dana BOS, termasuk perluasan perpustakaan, penerimaan siswa baru, pembelajaran siswa dan kegiatan ekstrakurikuler, ulangan dan ujian, serta pembayaran tunjangan bulanan kepada guru dan tenaga kependidikan yang berstatus honor, pengembangan profesional bagi guru, membantu biaya siswa miskin, pendanaan untuk pengelolaan BOS, serta pembelian dan pemeliharaan peralatan komputer.

Dalam penggunaan dana BOS untuk biaya pegawai sekolah negeri (guru honorer/tenaga kependidikan dan biaya kegiatan) ditetapkan sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima sekolah pada tahun anggaran. Adapun pencairan dana Bos tahun ajaran 2022 - 2023 yaitu sebanyak Rp. Rp. 430.100.000 dengan perhitungan siswa sejumlah 391 orang.

#### **1. Besaran Total Biaya (total cost) yang Diperlukan untuk biaya Penyelenggaraan Pendidikan di SMP Negeri 1 Merbau yang Bersumber dari Pemerintah pada Tahun Pelajaran 2022/2023.**

Ada 13 jenis kegiatan operasional yang menjadi prioritas utama pembiayaan menggunakan

dana BOS, yaitu: Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) , Kegiatan Pembelajaran Siswa dan Ekstra Kurikuler, Ulangan dan Ujian, Pembelian Bahanbahan Habis Pakai, Langganan Daya dan Jasa, Perawatan Sekolah, Pembayaran Honorarium Bulanan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer, Pengembangan Profesi Guru, Membantu Biaya Siswa Miskin, Pendanaan untuk Pengelolaan BOS, Pembelian dan Pemeliharaan Peralatan Komputer, dan Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s/d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

#### **2. Analisis Besarnya Satuan Biaya Pendidikan (unit cost) per Siswa dan Rata-rata Satuan Biaya Pendidikan Lainnya pada SMP Negeri 1 Marbau Tahun Pelajaran 2022/2023.**

Biaya satuan (unit cost) dalam dunia pendidikan merupakan biaya satuan yang sangat penting dalam penentuan biaya untuk setiap siswa dalam menyelesaikan pendidikannya. Fattah (2009 dalam (Fadillah et al., 2015)) mendefinisikan, bahwa “Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total

pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah (enrollment) dalam kurun waktu tertentu. Dapat dikatakan bahwa biaya satuan dihitung dengan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah dengan jumlah siswa yang aktif pada tahun pelajaran tersebut.

Proses penghitungan biayanya sebagai berikut :

Langkah pertama mengidentifikasi dan penggolongan biaya kegiatan. Berdasarkan data Keuangan di SMP Negeri 1 Marbau Tahun Anggaran 2022, dapat diidentifikasi bahwa terdapat enam kegiatan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Keenam kegiatan tersebut dapat dibagi menjadi dua pusat kegiatan: kegiatan langsung (utama) dan kegiatan tidak langsung (pendukung).

Pusat kegiatan langsung meliputi kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kesiswaan, sementara itu untuk pusat kegiatan tidak langsung meliputi kegiatan pengelolaan sarana prasarana, kegiatan pengelolaan sekolah, kegiatan administrasi sekolah, dan kegiatan kebersihan. Keenam kegiatan di SMP Negeri 1 Marbau

diklasifikasikan menjadi empat kegiatan, kegiatan yang menghasilkan hasil, kegiatan yang memberikan kontribusi hasil, kegiatan pendukung, serta kegiatan kebersihan dan rumah tangga. Kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kesiswaan masuk dalam kategori kegiatan yang membuahkan hasil karena berhubungan langsung dengan siswa. Kegiatan pengelolaan prasarana dan kegiatan pengelolaan sekolah dimasukkan dalam kelompok kegiatan kinerja karena mendukung langsung kegiatan dalam kelompok kegiatan kinerja, adapun kegiatan pengelolaan sekolah dan kegiatan pengembangan sekolah dimasukkan dalam kelompok kegiatan kinerja karena merupakan kegiatan yang menunjang kegiatan dalam kelompok aktivitas kinerja dan selanjutnya kegiatan produksi kebersihan masuk ke penggolongan menjadi kegiatan kebersihan dan rumah tangga.

Langkah kedua, pembebanan biaya ke aktivitas dan pembebanan biaya antar kegiatan. Setelah melakukan identifikasi dan pengelompokan kegiatan, selanjutnya yakni alokasi biaya berdasarkan kegiatan. Pembebanan biaya pada kegiatan dilakukan secara direct

tracing, driver tracing dan allocation. Biaya yang dicatat ke kegiatan yang berbeda baik aktivitas langsung (utama) maupun aktivitas pendukung diidentifikasi kembali apabila terdapat biaya untuk antar aktivitas, baik antar aktivitas pendukung maupun dari aktivitas pendukung ke aktivitas utama. Semua biaya pada aktivitas pendukung diusahakan untuk

memperlihatkan biaya langsung dari aktivitas pendukung ditambah biaya yang dihasilkan dari interaksi antar kegiatan pendukung sebelum membebankan biaya ke aktivitas utama. Semua aktivitas pendukung diperhitungkan kedalam aktivitas utama.

Berikut rekapitulasi pembebanan biaya antar aktivitas.

**Tabel 1. Pengelompokan Biaya berdasarkan aktivitas**

No	Elemen Biaya	Jumlah (Rp)
1	Gaji Pegawai	Rp 100,800,000.00
2	Biaya Kegiatan Kesiswaan	Rp 36,291,100.00
3	Biaya Peningkatan Mutu	Rp 51,111,500.00
4	Biaya Administrasi	Rp 40,201,550.00
5	Kegiatan Sarana Prasarana	Rp 22,835,100.00
6	Biaya Pengembangan Sarana	Rp 92,857,550.00
7	Biaya Peningkatan Sarana	Rp 23,428,000.00
8	Belanja Modal	Rp 62,555,200.00
Jumlah		Rp 430,080,000.00

Langkah ketiga, mengidentifikasi Cost Driver. Dalam pengidentifikasian kelompok aktivitas ini dimaksudkan untuk penentuan aktivitas dan tarif per unit cost driver. Untuk penentuan drivernya, hal yang dipertimbangkan adalah : Cost driver jam kerja (diasumsikan penyelenggaraan kegiatan belajar

berlangsung 7 jam perharinya). Cost driver jumlah siswa (ini digunakan untuk menentukan konversi biaya yang diserap oleh peserta didik pada kegiatan proses pembelajaran). Cost driver hari (diasumsikan bahwa penyelenggaraan kegiatan pembelajaran berlangsung selama 6 hari dalam setiap minggunya).

**Tabel 2. Pengelompokan Biaya dan Cost Driver**

Elemen Biaya	Jumlah (Rp)	Cost Driver	Jumlah (Rp)
Gaji Pegawai	Jumlah Jam Kerja	10.290	100,800,000.00
Biaya Kegiatan Kesiswaan	Jumlah Siswa	391	36,291,100.00
Biaya Peningkatan Mutu	Jumlah Siswa	391	51,111,500.00
Biaya Administrasi	Jumlah Hari Kegiatan	621	40,201,550.00

	Pendidikan		
Kegiatan Sarana Prasarana	Luas Lantai	1.906	22,835,100.00
Biaya Pengembangan Sarana	Luas Lantai	1.906	92,857,550.00
Biaya Peningkatan Sarana	Luas Lantai	1.906	23,428,000.00
Belanja Modal	Luas Lantai	1.906	62,555,200.00

Langkah keempat, menentukan tarif per unit cost driver . Menentukan tarif per unit cost driver dapat dilakukan setelah melakukan mengidentifikasi cost driver, dimana

tarif per unit cost driver dihitung dengan rumus sebagai berikut:

**Jumlah Aktivitas**

**Cost Driver**

Tabel 3. Penentuan Tarif Per Unit Cost Driver

Elemen Biaya	Jumlah (Rp)	Cost Driver	Biaya/Unit (Rp)
Gaji Pegawai	100,800,000.00	10.290	9,795.92
Biaya Kegiatan Kesiswaan	36,291,100.00	391	262,978.99
Biaya Peningkatan Mutu	51,111,500.00	391	370,373.19
Biaya Administrasi	40,201,550.00	621	194,210.39
Kegiatan Sarana Prasarana	22,835,100.00	1.906	11,980.64
Biaya Pengembangan Sarana	92,857,550.00	1.906	48,718.55
Biaya Peningkatan Sarana	23,428,000.00	1.906	12,291.71
Belanja Modal	62,555,200.00	1.906	32,820.15

Langkah kelima, menentukan biaya Satuan Pendidikan Peserta Didik per Angkatan Kelas. Biaya aktivitas dibebankan ke produk berdasarkan konsumsi masin-masing aktivitas produk. Pembebanan biaya overhead dari tiap aktivitas dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

**BOP yang dibebankan = Unit cost driver X Cost driver yang dipilih**

Kemudian hasil pembebanan biaya overhead setiap aktivitas dijumlahkan sampai diperoleh keseluruhan jumlah biaya, dimana nantinya biaya satuan (unit cost) memakai rumus :

**Biaya pendidikan satuan per siswa =  $\frac{\text{Jumlah Biaya}}{\text{Jumlah Siswa}}$**

Tabel 4. Penentuan Biaya Satuan Pendidikan Kelas VII

Elemen Biaya	Cost Driver	Biaya/Unit (Rp)	Total (Rp)
Gaji Pegawai	4410	9,795.92	43,200,007.20
Biaya Kegiatan Kesiswaan	119	262,978.99	31,294,499.81
Biaya Peningkatan Mutu	119	370,373.19	44,074,409.61
Biaya Administrasi	207	194,210.39	40,201,550.73
Kegiatan Sarana Prasarana	1906	11,980.64	22,835,099.84
Biaya Pengembangan Sarana	1906	48,718.55	92,857,556.30
Biaya Peningkatan Sarana	1906	12,291.71	23,427,999.26

Belanja Modal	1906	32,820.15	62,555,205.90
Jumlah Biaya			359,812,976
Jumlah Biaya Satuan Per Siswa			3,023,638

**Tabel 5. Penentuan Biaya Satuan Pendidikan Kelas VIII**

Elemen Biaya	Cost Driver	Biaya/Unit (Rp)	Total (Rp)
Gaji Pegawai	2940	9,795.92	28,800,005.
Biaya Kegiatan Kesiswaan	138	262,978.99	36,291,101.
Biaya Peningkatan Mutu	138	370,373.19	51,111,500
Biaya Administrasi	207	194,210.39	40,201,551.
Kegiatan Sarana Prasarana	1906	11,980.64	22,835,100
Biaya Pengembangan Sarana	1906	48,718.55	92,857,556
Biaya Peningkatan Sarana	1906	12,291.71	23,427,999
Belanja Modal	1906	32,820.15	62,555,206.
Jumlah Biaya			358,080,018
Jumlah Biaya Satuan Per Siswa			2,594,783

**Tabel 6. Penentuan Biaya Satuan Pendidikan Kelas IX**

Elemen Biaya	Cost Driver	Biaya/Unit (Rp)	Total (Rp)
Gaji Pegawai	2100	9,795.92	20,571,432
Biaya Kegiatan Kesiswaan	134	262,978.99	35,239,185
Biaya Peningkatan Mutu	134	370,373.19	49,630,007
Biaya Administrasi	207	194,210.39	40,201,551
Kegiatan Sarana Prasarana	1906	11,980.64	22,835,100
Biaya Pengembangan Sarana	1906	48,718.55	92,857,556
Biaya Peningkatan Sarana	1906	12,291.71	23,427,999
Belanja Modal	1906	32,820.15	62,555,206
Jumlah Biaya			347,318,036
Jumlah Biaya Satuan Per Siswa			2,591,925

Berdasarkan tabel diatas, dapatlah disimpulkan terkait hasil perhitungan biaya satuan pendidikan SMP Negeri 1 Marbau menggunakan metode Activity based costing bahwa biaya satuan per siswa per tingkat di SMP Negeri 1 Marbau Tahun Anggaran 2023 untuk setiap tahunnya berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) untuk Kelas VII sebesar Rp 3,023,638 kemudian Kelas VIII sebesar Rp 2,594,783 dan

untuk Kelas IX sebesar Rp 2,591,925.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penerapan metode Activity Based Costing (ABC) untuk menghitung Biaya Satuan di SMP Negeri 1 Marbau terkait aktivitas yang ada di SMP Negeri 1 Marbau digolongkan menjadi : Aktivitas

langsung yang terdiri dari aktivitas belajar mengajar dan kesiswaan dan aktivitas tidak langsung terdiri dari aktivitas pengelolaan sarana prasarana, manajemen sekolah, administrasi sekolah dan kebersihan.

b. Didapatkan biaya Satuan per siswa per tingkat di SMP Negeri 1 Marbau pada Tahun Anggaran 2023, Tahun Pelajaran 2022 - 2023 berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) yakni: untuk Kelas VII sebesar Rp 3,023,638 kemudian Kelas VIII sebesar Rp 2,594,783 dan untuk Kelas IX sebesar Rp 2,591,925.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- . Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*.
- . Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 08 Tahun 2017 tentang *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*.
- Enggar Kurniasih, Dhyah Setyorini. 2018. *ANALISIS PERHITUNGAN BIAYA SATUAN DENGAN METODE ACTIVITY BASED COSTING (ABC) DI SMP NEGERI 1 KASIHAN*. VOL 7. NO. 3. 2018. Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia.
- Indra Bastian. 2007. *Akuntansi Pendidikan*. Erlangga: Jakarta.
- Liasari Nurfauzia, Abdullah Taman. 2018. *PENGHITUNGAN BIAYA SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 PURWOKERTO*. Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muhammad Rizki Syahputra, Eka Daryanto, Irsan rangkuti. 2018. *PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (MTs ISLAMIYAH YPI BATANGKUIS KAB. DELI SERDANG*. Vol 11. No.2. Manajemen Pendidikan dan tenaga Kependidikan.
- Nur Fadillah, Anak Agung Gede Agung, I Made Yudana. 2015. *ANALISIS BIAYA PENDIDIKAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMP NEGERI 2 SUKASADA TAHUN PELAJARAN 2013/2014*. Vol 6. No.1. e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan.

Santi                      Setyaningrum.*Analisis*  
*Perhitungan Biaya Satuan*  
*dengan Model Activity Based*  
*Costing untuk Menentukan*  
*Standar Biaya di SMK Negeri 3*  
*Kota Tangerang Selatan.*  
Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah  
Jakarta. 2014

Undang-Undang      Dasar      Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun  
2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional